



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2016



Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2016

**Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat**  
**Jl. Kurungan Bassi No. 19 Mamuju, 91511**  
**Telp : 0426-21027 Fax : 0426-22579**  
**Website : [dinkes.sulbarprov.go.id](http://dinkes.sulbarprov.go.id)**  
**Email : [dinkessulbar@gmail.com](mailto:dinkessulbar@gmail.com)**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah dalam menunjang pembangunan Daerah khususnya di bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

Harapan kami Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 ini menjadi media dalam membangun kebersamaan, sinergitas serta komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat terbaik khususnya di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada masa datang.

Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya serta perlindungan bagi kita semua amin ya robbal alamin.

Ayo bergerak dan bekerja keras menuju Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi

Mamuju, 21 April 2017  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Barat

  
Dr. H. Achmad Azis, M.Kes

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tupoksi.....	4
C. Sumber Daya Manusia .....	5
D. Sarana Prasarana .....	12
BAB II. DOKUMEN PERENCANAAN .....	15
A. Rencana Strategis .....	15
B. Rencana Kerja Tahun 2016 .....	19
BAB III. CAPAIAN KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Masalah .....	29
BAB IV. PENUTUP .....	40

LAMPIRAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu **“Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat tahun 2016”** dan Misi Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparaturnya pemerintah daerah

dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.

2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.
3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.
5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas.

Berdasarkan Tupoksi SKPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Sebagai laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016, disusun Laporan pelaksanaan Pembangunan Daerah (LPPD) Bidang Kesehatan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat Sulawesi Barat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara aman, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, baik di daerah terpencil, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat mengakui bahwa kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terbatasnya pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat merupakan upaya tantangan bagi pemerintah untuk menempuh langkah-langkah khusus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara mudah dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Visi **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan mandiri pada tahun 2016”** yang diwujudkan dalam 4 (Empat) misi :

- a. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- b. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- c. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### B. TUPOKSI

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pelayanan Medis
4. Bidang Bina P2PL
5. Bidang Pelayanan Farmasi

Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yang bertanggung terhadap ketersediaan obat. UPT tersebut yaitu Intalasi Farmas dan UPTD Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
4. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

#### C. Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan fisik dan penambahan sarana prasarana, penambahan peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan. Namun dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karakteristik dan fungsi tenaganya.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di Masyarakat

Dinas Kesehatan pada tahun 2016 memiliki 129 pegawai dengan rincian terlampir ;

NO	NAMA / TEMPAT / TGL. LAHIR /	NIP	GOL RUANG	JABATAN
1	2	3	4	6
1	dr.H.Achmad Azis,M.Kes / Sengkang / 15 Mei 1959	19590515198903106	IV/d	Kadinkes Prov.Sulbar
2	Dra.Hj.Rustia,sy, Apt., M.Kes, RS/Polmas /13 Agustus 1959 /	195908131988032001	IV/b	Kepala UPTD Gudang Farmasi
3	Dra.Hj.Sufiani,Apt,M.Kes/Sinjai,1963	196312311995032005	IV/b	Kepala Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan
4	dr.Hj.Indahwati Nursyamsi, MARS / Ujung Pandang / 06 Maret 1968	196803062002122002	IV/a	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar

5	dr.H.Muh.Ihwan/01 Mei 1972	197205012000121006	IV/a	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
6	Muzdalipah,SKM,M.Kes / Lise / 07 April 1970	197004071998031007	IV/a	Sekretaris Dinas Kesehatan
7	dr.Hj.Nursyamsi R.Hamsah/Ujung Pandang/01 Feb 1970	197002012002122006	IV/a	Kabid Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak
8	Hj.Rosmiani, SE, M.Kes / 12/04/1967	196704121987032000	IV/a	Kepala UPTD Poliklinik Kesehatan
9	Syarifuddin Hamal,SKM / Tinambung / 17 September 1959	195909171985031027	III/d	Kasie Kesehatan Lingkungan
10	Jayasni,Ssi,Apt / Mambi / 22 Desember 1972	19721222200312 2 010	III/d	Kasubag Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi
11	Aminuddin,SSI,Apt / 19 November 1970	197011192003121002	III/d	Kasie Distribusi dan Penyimpanan UPTD Instalasi Farmasi
12	dr.Hj.Marintani Erna/ 24 Mei 1969	196905242003122000	III/d	Kasie Pengendalian Penyakit
13	dr.H.Awaluddin/ 01 Mei 1964	196405012002121005	III/d	Staf Poliklinik
14	Hj.Lidyawati Dahlan,SKM / Tinambung / 02 Maret 1978	197803022001122000	III/d	Staf Dinkes
15	dr.Asra Nur/Wasewali Soppeng/ 29 Mei 1975	197505292002122000	III/d	Staf Dinkes
16	Wahyuddin,SE,M.Kes / Congko / 14 Februari 1973	19730214 2006041013	III/d	Kasubag Program dan Pelaporan
17	Sriyana Makkasau,SKM,M.Kes/ Pare-pare / 09 Desember 1975/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197512092006042017	III/d	Kasie Sarana dan Peralatan ALKES
18	Sofiawaty Sofyan,SP,M.Kes/Pinrang/25 Juli 1974/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197407252006042028	III/d	Kasie Gizi
19	Firman Gazali,SKM,M.Kes / Ujung Pandang / 26 Desember 1977	197712262006041013	III/d	Kasie Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
20	Andi Tenri Bulaeng,STP,M.Kes/Amparita Sidrap/14 April 1975/KR-.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197504142006042033	III/d	Kasie Kesehatan Ibu dan Anak
21	Sri Surlanti,SKM,M.Kes / Gandra / 15 Agustus 1977	197708152006042029	III/d	Kasie Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra
22	Ernawati Sessu, SKM / 01 Juni 1974	197406011999032000	III/d	Staf Sekretariat
23	dr.Dewi Kartikaningsih / Surabaya / 29 Mei 1977	197705292006042000	III/c	Staf Dinkes
24	dr.Darmawiah/01 September 1980/	198009012006042023	III/c	Kasie Pelayanan Kesehatan Dasar
25	A.Erieka Novianti,SKM,M.Kes/Ujung Pandang 1 November 1980	198011012003122007	III/c	Kasie Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Khusus dan Pengembangan
26	Mahdiana.B,SKM / Mamuju / 28 Juli 1980 / KR-N-1167/KARPEG/C-58/04	198007282003212008	III/d	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
27	Muh.Tamsil / Majene / 01 Februari 1970	197002011991011001	III/c	Kasie Kefarmasian Makanan dan Minuman

28	A.Taswin Akbar R,S.Farm/Galung Mamuju/22 Juni 1983	198306222006041006	III/c	Kasie Perencanaan dan Pelaporan UPTD Instalasi Farmasi
29	Hartati, S.Kep,Ns/ 31 Oktober 1975	197510311999032001	III/c	Staf Poliklinik
30	Sukma Jaya, SKM/ Mamuju 19 Juli 1978	197807192006041010	III/c	Staf Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
31	Wahida, SKM / Majene, 29/12/1980	198012292005022007	III/c	Staf Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
32	Nuraeni Amir,SKM/Pinrang/30 Oktober 1982	198210302008042002	III/b	Kasie Kestrad, Alternatif, komplementer dan kesehatan kerja
33	Nana Darmania,S.Sos,M.Kes / Surabaya / 25 Desember 1974 /	197412252007012025	III/d	Kasie Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
34	Jailuddin T, S.Pd.I / Polmas, 31/12/1960	196012311986031500	III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian
35	dr.Reni Tengar/Parepare/07/06/1978	197806072006042024	III/b	Staf Dinas Kesehatan
36	dr. Andi Dhedie Prasetya Sam,S.Ked/ 17 Agustus 1984 /	19840817200902 1 001	III/c	Staf Binkesmas
37	Wahidah,SKM / Wonomulyo/25 Desember 1979	197912252008042003	III/b	Staf Dinkes
38	Yuliana, SKM / Pasabbu/10-9/1978/	197809102008042000	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
39	Nirwana, SKM /Mamuju/15 November 1972	197211152001122003	III/b	Staf Kesehatan Lingkungan
40	Syukriani/Baturoro/25 Agustus 1980/KR.IV-0341/KARPEG/I-P3/2008	198008252006042032	III/b	Staf Surveilans, Imunisasi dan kesehatan Matra
41	Andi Karyawati,SKM,M.Kes / Leppang / 04 Mei 1982 /	198205042009022003	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
42	Iriyanti,SKM / UjungPandang /11 September 1983 /	19830911200902 2 003	III/b	Staf Program dan Pelaporan
43	Faradilla Sandi Mansyur,SKM / Mamuju / 01 Maret 1985 /	19850301200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
44	Anwar,SKM / Sumpang Ale /03 April 1980 /	19800403200902 1 003	III/b	Staf P2PL
45	Hasriani Anwar,S.Kep / Salujambu / 09 September 1985 /	19850909200902 2 009	III/b	Staf Program dan Pelaporan
46	Fadliati,SKM / Majene / 03 Agustus 1986 /	19860803200902 2 002	III/b	Staf P2PL
47	Yustinus,SKM / Mamuju /10 Januari 1980 /	19800110200902 1 002	III/b	Staf Poltekkes
48	Mufridah M.Nadir,S.Farm / Mamuju /23 Mei 1984 /	19840523200902 2 004	III/b	Staf Yanfar
49	Maya Sofyan,SKM / Benteng / 13 Mei 1982 /	19820513200902 2 002	III/b	Staf Binkesmas
50	A.Chandrawali,SKM,M.Kes / Tanete / 31 Januari 1978 /	19780131200902 2 001	III/b	Staf Poltekkes
51	Nurlaela,S.SIT / Bulukumba / 15 Mei 1982 /	19820515200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
52	Muskiah. B/ Majene 2 Desember 1978	197812022002122003	III/b	Staf Dinkes

53	Emilda Yulinda, SKM/ 24 Juli 1973	197307241992032001	III/b	Staf Dinkes
54	Armawati,SKM / 12 November 1981 /	19811123200902 2 004	III/b	Staf Binkesmas
55	Fauziah Ahmad,S.SIT / Ujung / 22 Oktober 1985 /	19851022200902 2 006	III/b	Staf Binkesmas
56	Dewi Karlina Abeng,SKM/Ujung Pandang/05 Maret 1984/	198403052010012021	III/b	Staf Binkesmas
57	Myardi Mulawardi/Ujung Pandang/25 Maret 1986 /	198603252010011007	III/b	Staf P2PL
58	Nur Aminuddin Ramlie,SKM	580031477	III/a	Staf Program dan Pelaporan
59	Rina Latif,A.MG/Ujung Pandang/1 Maret 1971	197103011995032002	III/a	Staf Binkesmas
60	Suryalinda,AMK / Rante Palado /07 September 1986 /	19860907200902 2 005	III/a	Staf Pelayanan Medik
61	Aini Aisyah Alfian Putri/ Ujung Pandang, 27/02/1981	198102272005022004	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian
62	Sri Wahyuni,SKM/Majene/28 Desember 1986	198612282010012015	III/b	Staf Keuangan
63	Rahmawati,SKM/Salu Kalobe/10 Februari 1980/	198002102010012011	III/b	Staf Binkesmas
64	Arsiwanty AR,SKM/Sinjai/03 Februari 1983/	198302032010012016	III/b	Staf Program dan Pelaporan
65	Fajriana,S.Farm/Oro Batu/23 September 1983	198309232010012016	III / b	Staf UPTD Gudang Farmasi
66	Muh.Irfan Ilham Atjo,SKM/Somba/30 Juni 1986	198606302010011005	III/b	Staf Keuangan
67	Yogi Prayogi / Kuningan / 23 Maret 1975	580031504	III/a	Staf Dinkes
68	Rachmi,SKM / Maros / 01 Agustus 1970	197008011993112001	III/b	Staf Subag Program dan Pelaporan
69	Darwis, SKM/ 05 Maret 1984	198403052005011005	III/b	Staf Binkesmas
70	Agustina Uta Tabang Kalua, S.Gz/29 November 1979	197911292005012020	III/a	Staf Binkesmas
71	Yulianus Dupa Budi,A.Md.F / Soroako / 25 Juli 1978	19780725200604 1 017	III/a	Staf.Obat dan Alkes
72	Irwan Adi Putra, SKM/ 11 Januari 1982	198201112006041017	III/a	Staf P2KL
73	Faisal,ST / BontoBangun / 28 Agustus 1977 / KR.IV-0354/KARPEG	197708282006041023	III/a	Staf Pelayanan Medik
74	Heriyanto Karim,SKM / Majene, 16/04/1986	198604162011011000	III/b	Staf Keuangan
75	Mardawiah,SKM / Latedong, 17/05/1984	197712252011011000	III/b	Staf Yanfar
76	Jawahira,SKM / Punranga, 25/12/1977	197712252011011000	III/b	Staf Binkesmas
77	Zaldy Al Qadri,SKM / Ujung pandang, 22/05/1987	198705222011011000	III/b	Staf Umum dan Kepegawaian

78	drg.Rasdiana / Majene, 07/08/1989	198908072015062000	III/b	Staf Dinkes
79	Musdalifah,SKM / Mambi, 06/09/1986	198609062011012000	III/b	Staf P2KL
80	Niswah Nurdin,SKM / Ujung Pandang, 05/06/1984	198709282011012000	III/b	Staf UPTD Gudang Farmasi
81	Armiati,SKM / Ujung Pandang, 28/09/1987	198709282011012000	III/b	Staf Keuangan
82	Marjono,SKM / Mamasa, 21/03/1985	198503212011011009	III/b	Staf Program dan Pelaporan
83	Nurdiani,SKM / Polewali,20 Maret 1987	198703202011012000	III/b	Staf Program dan Pelaporan
84	Syafruddin, S.Farm / Majene, 14/09/1988	198809142011011000	III/b	Sraf Kefarmasian, Makanan dan Minuman
85	Rina,S.Farm / Ugi Baru, 21/07/1985	198507212011012000	III/a	Staf UPTD Gudang Farmasi
86	Fita Diansari, S.Si.Apt / Ujung pandang, 21/03/1986	19860321 201101 2 016	III/c	Staf Yanfar
87	Rendi Rivaldi,SKM / Mamuju, 11/12/1986	198612112011011000	III/a	Staf Yanfar
88	Faridah Wahab,S.Farm / 17 Oktober 1986	198610172011012000	III/a	Staf UPTD Gudang Farmasi
89	Muh.Jafar,AMK / Pallu'dai /05 Juni 1984 /	19840605200902 1 004	III/a	Staf Pelayanan Medik
90	Endrawaty Amrah/Ujung Pandang/22 desember 1978	19781222 200604 2 027	III/a	Staf Umum dan Kepegawaian
91	Iqbal / TombloPai / 03 April 1980	198004032006041020	III/a	Staf Pelayanan Medik
92	Irham A.md,KI / Polewali / 13 Januari 1975	197501132006041007	III/a	Staf Program dan Pelaporan
93	Ririn Handayani,Amd.Kep/Pekkae/21-07/1984/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	198407212006042000	III/a	Staf P2PL
94	Haryanti,Amd.Pk/Pinrang/06-09-1983/KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	198309062006042020	III/a	Staf UPTD Poliklinik
95	Rini Ekaputri,Amd.Tem / Bantaeng / 03 Juni 1979 / KR.IV-0354/KARPEG/I-P3/2008	197906032006042030	III/a	Staf.Obat dan Perbekkes
96	Ika Yulianti,A.Md.KI / Banyuwangi / 27 Juli 1985	198507272008042005	II/d	Staf P2PL
97	Ahmad,Amd.Kep / Kalukku /05 November 1986 /	19861105200902 1 002	II/d	Staf Binkesmas
98	Pardi,Amd.Kep / Pempionang /31 Desember 1985 /	19851231200902 1 005	III/a	Staf Pelayanan Medik
99	Yulianti,Amd.Kep / Ujung Pandang /24 Agustus 1987 /	19870824200902 2 002	II/d	Staf Pelayanan Medik
100	Abdullah.S,Amd.KL / Batetangnga /12 Februari 1982 /	19820212200902 1 004	II/d	Staf P2PL
101	H. Amirullah, S.Kep / Belang-belang /12 Februari 1982 /	19820212200902 1 004	III/a	Staf Umum dan Kepegawaian

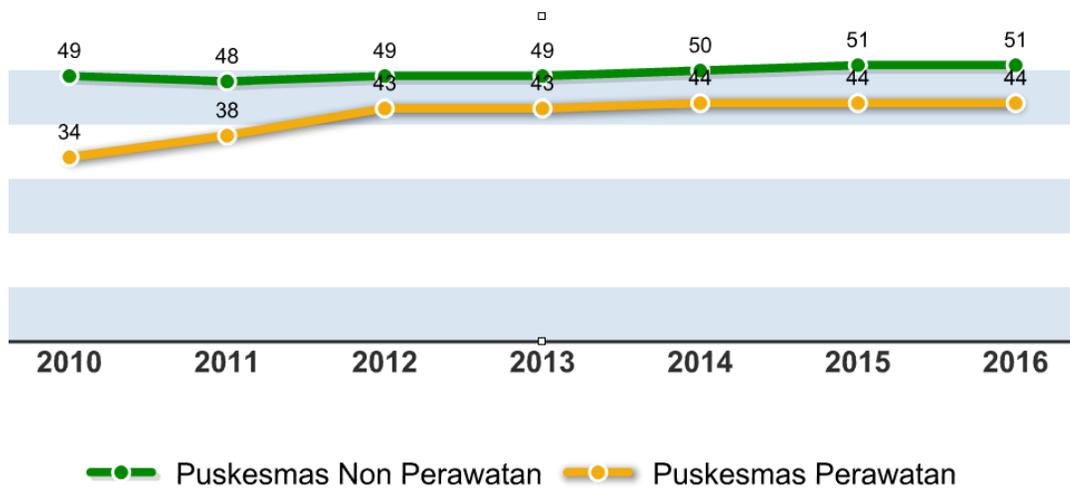
102	Ramadhan,AMK / Tinggas-tinggas /01 Juli 1985 /	19850701200902 1 002	II/d	Staf P2PL
103	Sriwati Najamuddin,Amd / Somba / 03 Januari 1980 /	19800103200902 2 005	II/d	Staf P2PL
104	Suleha J,Amd.Kep / Bonra / 17 September 1982 /	19820917200902 2 005	II/d	Staf Umum dan Kepegawaian
105	Febry Sutrianty,Amd.Farm / Tajuncu / 06 Februari 1984 /	19840206200902 2 003	II/d	Staf Poliklinik
106	Satriani,Amd.Farm / Pinrang /08 Maret 1986 /	19860308200902 2 005	III/a	Staf Gudang Farmasi
107	Afdaliah,AMK / Sampaga /02 Februari 1985 /	19850202200902 2 008	II/d	Staf Binkesmas
108	Idawati,AMG/Sirindu/10 November 1979 /	197911102003122001	II/d	Staf Binakesmas
109	Muhammad Rizal, A.Md.Ft / Punranga, 04/12/1975	1975120152011010000	III/a	Staf Pelayanan Medik
110	Sri Handayani, AMD.Kom / Ujung Pandang, 26/09/1985	19850926 201101 2 022	II /d	Staf Penyusunan Program dan Pelaporan
111	Nur Asryany Pratama, Amd.Far / Ujung Pandang, 23/12/1988	'19881223 201101 2 019	II /c	Staf Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
112	Rika Karmeli Rerung,AMK / Parepare, 07/01/1984	198401072011012000	II /d	Staf Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra
113	Muh.Saleh,AMK / Tandassura, 07/04/1987	198704072011011000	II /c	Staf Perencanaan
114	Syamsucri, A.Md.KL / Kutulu, 06/08/1975	19750806 201001 1 018	II /c	Seksi Kesehatan Lingkungan
115	Rida Hasriani, AMKG / Soppeng, 12/04/1987	198704122015032001	II/c	Staf UPTD Poliklinik
116	Adryani Sirandan, Amd.Farm/ 28 Agustus 1989	198908282010012001	II/d	Staf UPTD Gudang Farmasi
117	Nurul Iman,Amd.Kep/Lapeo/30 November 1987/	198711302010012012	II/d	Staf Pelayanan Medik
118	Idrus Hasni Muhammad Yasin,Amd.Farm/Lombok Tengah/24 April 1981/	198104242010011009	II/d	Staf UPTD Gudang Farmasi
119	Evi Kalsum, AMK / Ammani, 20/05/1988	198805202011012014	II/d	Staf Umum dan Kepegawaian
120	Megawati S, Amd.Kep / Polewali, 16/07/1985	198507162011012016	II/c	Staf Kestrada, Alternatif, Komplementer dan Kesker
121	Muslimin / Pangkajene / 17 Juni 1981	198106172006041013	II/c	Staf P2KL
122	Dian Sartika Rahman/Pare-pare/25-07-85/KR.IV-0220/KARPEG/I-P3/2008	19820606 2010011025	II /b	Staf Pelayanan Medik
123	Mansyur	19820606201001 1025	II /a	Staf Poliklinik
124	Harsalim / Lampa, 18/08/1978	19780818 201001 1 020	II /c	Staf P2KL
125	Fatimah Azis / Nunukan, 04/05/1984	198405042014082002	II/a	Staf Penyehatan Lingkungan
126	Edyawati / Pabeta, 24/04/1982	198204242014102001	II / a	Staf Umum dan Kepegawaian

127	Kasfanuddin / Pompanua, 03/11/1984	198411032014101001	II/a	Staf Pengendalian Penyakit
128	Staf Pengendalian Penyakit	198304142015041001	II /a	Seksi Sarana Prasarana dan Alkes
129	Rasdiana	198604142014102002	I/a	Staf Keuangan dan Perlengkapan

D. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Data tahun 2015 Jumlah Rumah sakit di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 9 Rumah sakit yang terdiri atas 7 Rumah Sakit Pemerintah dan 2 Rumah Sakit Swasta.

Jumlah Puskesmas tahun 2015 sebanyak 95 Puskesmas yang terdiri atas Puskemas Non Perawatan 51 dan Puskesmas Perawatan 44 Puskesmas.



Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat asset yang dikuasai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 sebesar Rp. 15.408.739.157,33 dan asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 377.796.102,67

## **BAB II**

# **DOKUMEN PERENCANAAN**

**BAB II****DOKUMEN PERENCANAAN****A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2012 – 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 – 2016.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.1

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	2016
Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,2
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	78,3
Terselenggaranya Standarisasi dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase RS yang terakreditasi	60
			Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	75
			Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	52

Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 13,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	90
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90
Menurunkan Angka Kematian Balita dari 14,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Balita menurun hingga 27% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	87,6
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016	Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	87,6
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber -PHBS	80
		70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif	70
		35% Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada tahun 2016	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	35
Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk sebesar 1 pada tahun 2016	Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	1,5
	Persentase kasus baru TB Paru (BTA	Kasus TB Paru (BTA +)	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	75

	Positif) yang ditemukan	ditemukan berkurang		
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016	Persentase desa UCI meningkat	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas mencapai 82% pada tahun 2016	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	80
	Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan pengobatan alternatif mencapai 100% pada tahun 2016	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	100
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%	Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	100
Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan	100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100
	100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Kabupaten yang melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	100
	100% Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahun	Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA	Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	83
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan	100 % tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	70
Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel,	100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem	Kabupaten dan Provinsi menyusun Profil kesehatan tiap tahun dan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	100%

lengkap dan tepat waktu	Informasi Kesehatan	memiliki bank data kesehatan		
-------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2012 – 2016

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2016

Program prioritas Kementerian Kesehatan terdiri atas 12 Program utama dan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 9 Program prioritas atau sekitar 75%

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	RKA 2016
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	V	V
2	Program Lingkungan Sehat	V	V
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V
4	Program Upaya Kesehatan Perorangan	-	-
5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	V	V
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	V	V
7	Program Sumber Daya Kesehatan	V	V
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	V
9	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	V	-
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	V	V
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	V	V
12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	V	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

Program prioritas ini dilaksanakan melalui Pelaksanaan Kegiatan; Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Monitoring dan evaluasi, Kegiatan fasilitasi kepada kabupaten

Program kesehatan lainnya yang dilaksanakan adalah :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan
2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
4. Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA**

### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA

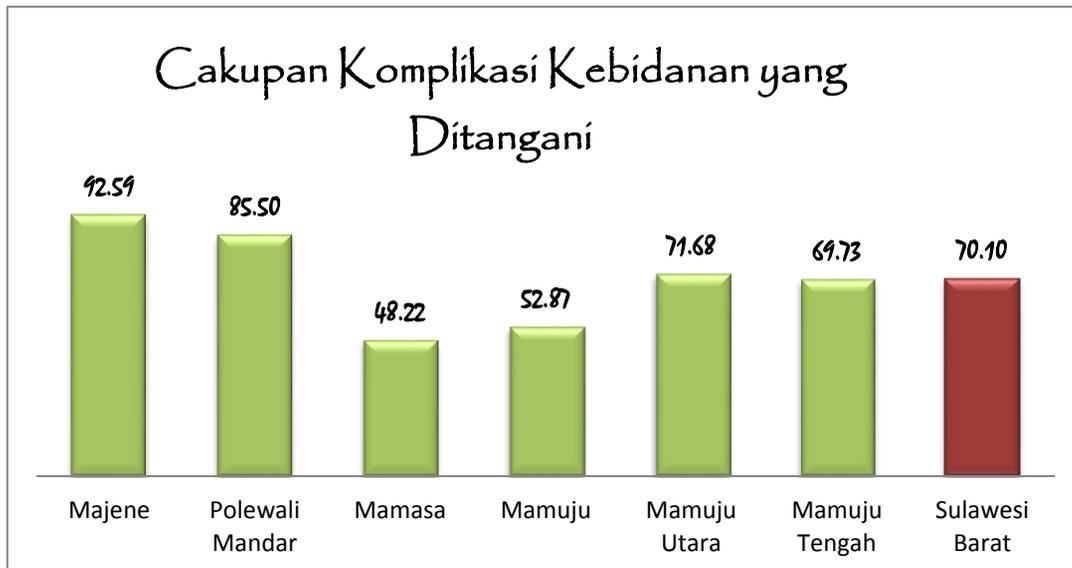
Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Dinas Kesehatan yang meliputi 8 (delapan) indikator kinerja kunci, yakni :

1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani.

Risiko tinggi pada ibu hamil adalah keadaan penyimpangan dari normal yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Risti/komplikasi kebidanan meliputi Hb<8 %, Tekanan darah tinggi (Sistole >140 mmHg, diastole > 90 mmHg), Oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan > 36 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur.

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh tenaga bidan didesa dan puskesmas, beberapa ibu hamil yang memiliki resiko tinggi (risti) memerlukan pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan dalam memberikan pelayanan, maka kasus tersebut perlu dilakukan rujukan ke unit pelayanan kesehatan yang memadai.

Rata – Rata Persentase resiko komplikasi kebidanan tahun 2016 yang ditangani sebesar 70,10% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 66,19%. Kabupaten dengan capaian tertinggi Kabupaten Majene 92,59% dan capaian terkecil kabupaten Mamasa 48,22%.



Kegiatan – Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan Kespro yg responsif gender dengan jumlah anggaran 200.000.000 dengan realisasi
- Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun untuk PKM dengan Anggaran 200.000.000 dengan realisasi 197.040.000
- Pelatihan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit dengan Anggaran 104.730.000 dengan realisasi 104.250.000

2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan.

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2016 untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 81,07%. Kabupaten Mamuju Tengah adalah kabupaten dengan capaian tertinggi 87,42% dan yang terendah adalah kabupaten Mamuju 74,66%.

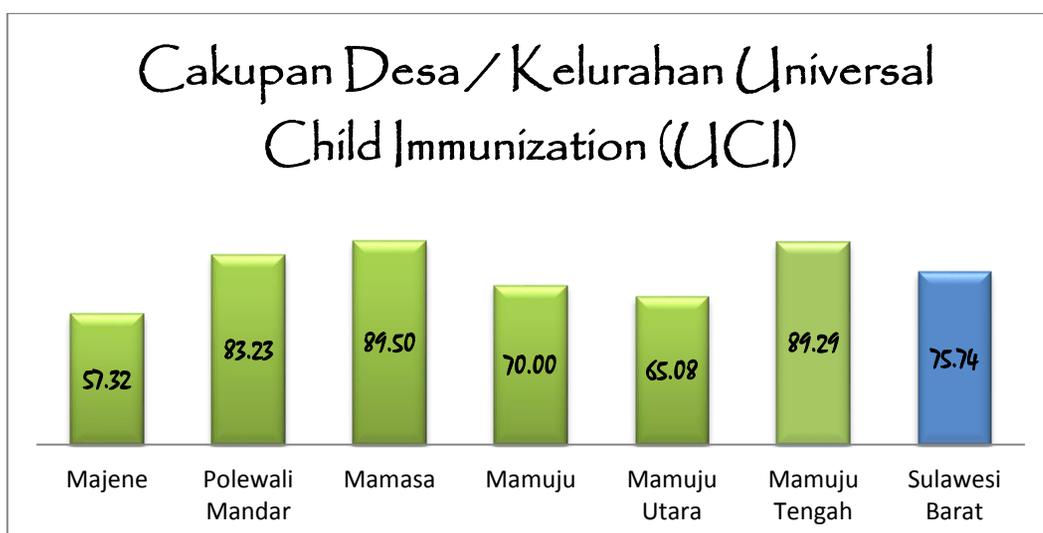
- Peningkatan Pelayanan Kespro yg responsif gender dengan jumlah anggaran 200.000.000 dengan realisasi
- Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun untuk PKM dengan Anggaran 200.000.000 dengan realisasi 197.040.000

- Pelatihan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit dengan Anggaran 104.730.000 dengan realisasi 104.250.000



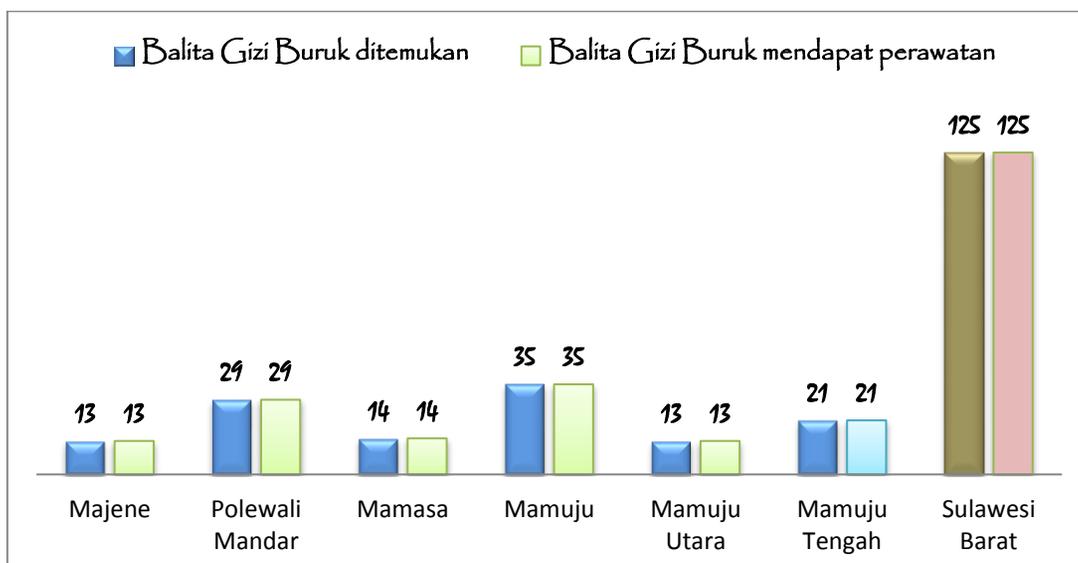
3. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah status imunisasi anak yang lengkap. Cakupan desa / kelurahan UCI tahun 2016 sebesar 74,74%. Capaian UCI tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah 89,29% dan terendah Kabupaten Mamuju Utara 65,08%.



#### 4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

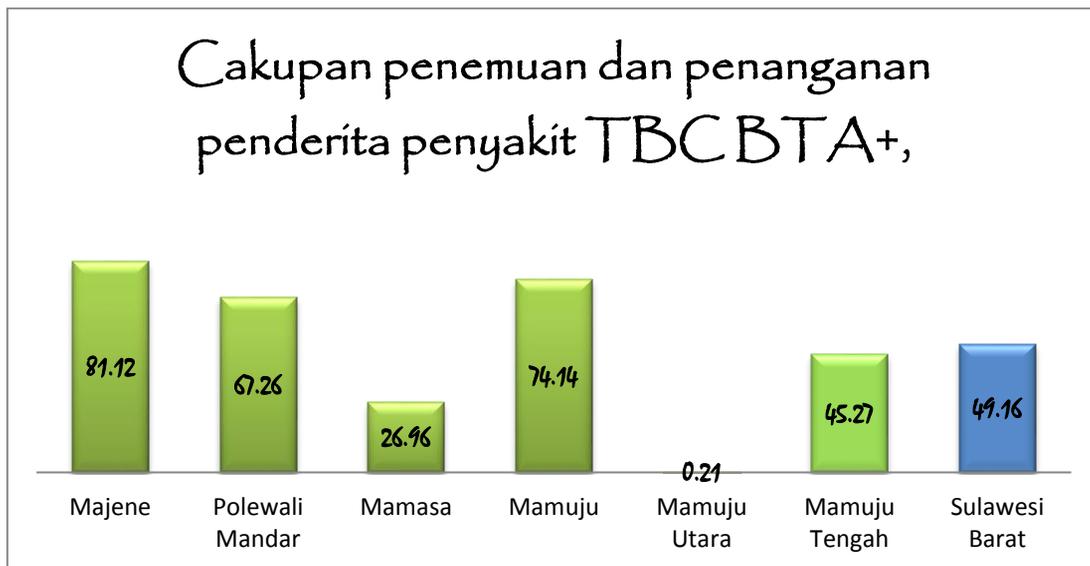
Berdasarkan hasil Pemantauan Staus Gizi (PSG) tahun 2015 dengan menggunakan indikator BB/U, secara umum prevalensi gizi buruk dan kurang di Sulawesi Barat adalah 18,8% Seluruh kabupaten di Sulawesi Barat masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas prevalensi nasional. Mengingat masalah gizi buruk disebabkan oleh multifaktor maka penanggulangannya harus melibatkan seluruh sektor terkait. Khusus sektor kesehatan penanggulangan gizi buruk dengan beberapa kegiatan seperti pemberian MP-ASI, pelacakan dan investigasi kasus gizi buruk serta perawatan kasus gizi buruk. Dari laporan kabupaten tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk yang dirawat dan dilaporkan adalah 418 anak. Untuk mengetahui prevalensi gizi buruk setiap tahunnya harus dilaksanakan Pemantauan Status Gizi (PSG) di setiap kabupaten. Cakupan penanganan gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 100%.



#### 5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+

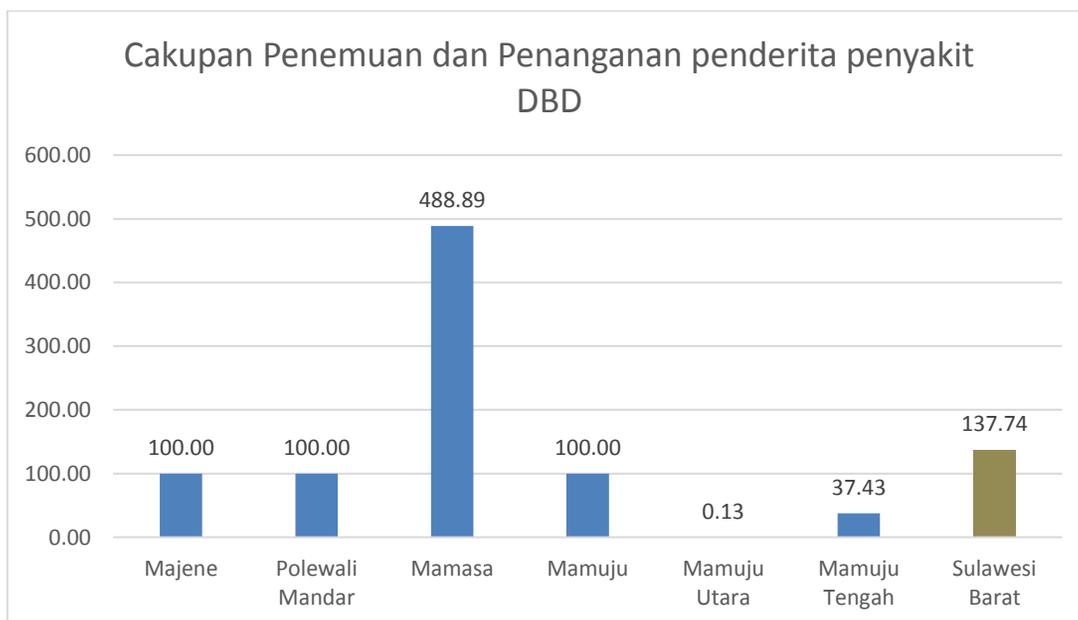
Penanggulangan TB di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun lalu. Rata – Rata Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ kabupaten tahun 2015 sebesar 67,20% menjadi 49,16% pada tahun 2016. Angka ini belum mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Kabupaten dengan cakupan penemuan dan penanganan TB tertinggi adalah kabupaten Majene dengan capaian 100% dan yang terendah adalah kabupaten Mamasa yang hanya mencapai angka 81,12%. Kegiatan penanggulangan perlu dimaksimalkan memberdayakan semua potensi yang ada termasuk adanya sharing dana dari APBD yang masih kurang.

Kegiatan penanganan penyakit TB di support lebih banyak melalui bantuan dana Global Fund (GF).



6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.

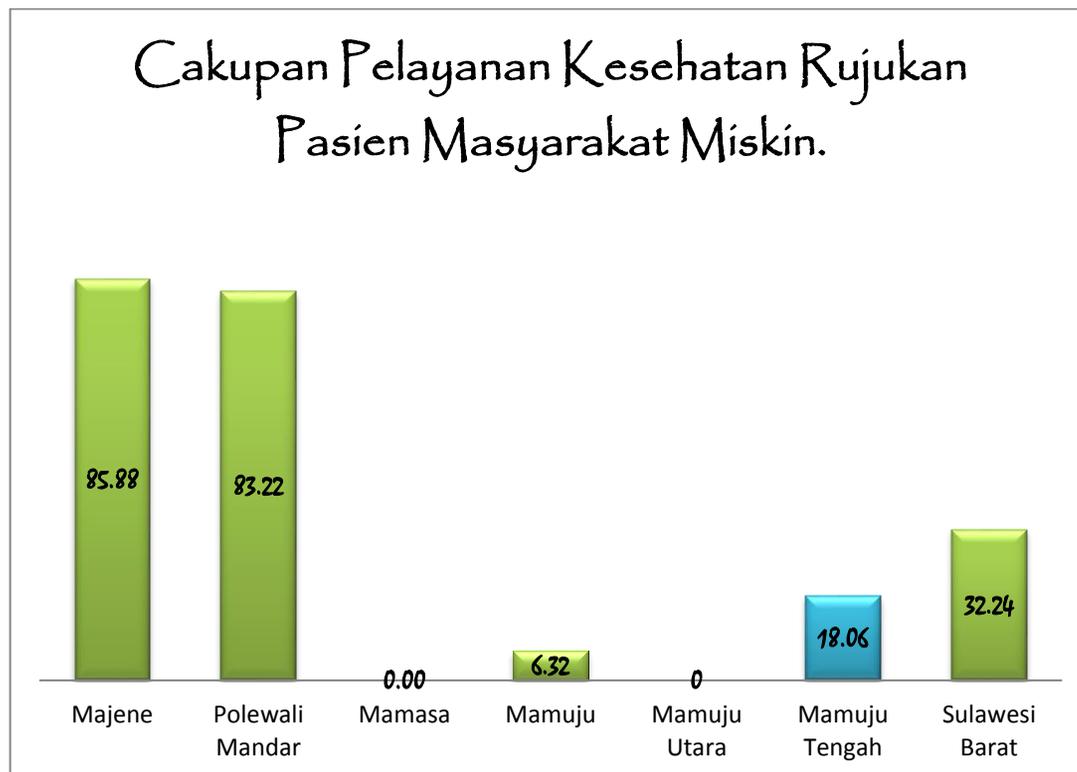
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD untuk Tahun 2016 sebesar 137,74%. Tahun ini semua Kabupaten dengan cakupan penderita DBD mampu menangani penderita penyakit DBD. Semua kasus yang dilaporkan ke sarana kesehatan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten di kabupaten masing – masing.



7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

Rata – Rata Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin menurut kabupaten mengalami penurunan Tahun 2016 sebesar 32,48% dari Tahun

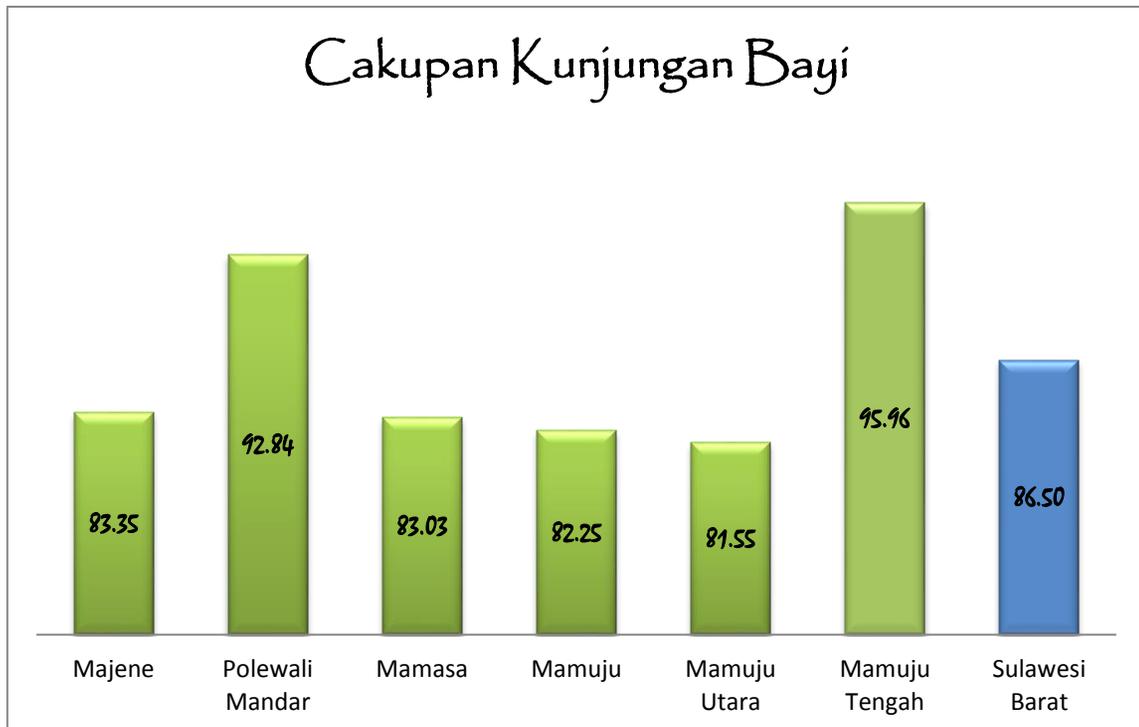
2015 sebesar 48,73%. Artinya dari semua masyarakat miskin yang sakit dan dirujuk ke Rumah Sakit sebesar 32,48%. Kabupaten dengan Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang tertinggi adalah kabupaten Majene dengan capaian 85,88%, Capaian terendah adalah kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa dengan capaian hanya 0%



Untuk capaian sementara dalam tahap revisi di Kementerian Kesehatan RI karena indikator sasarannya terlalu tinggi dan bertolak belakang dengan jumlah kasus / kejadian dilapangan

#### 8. Cakupan Kunjungan Bayi.

Cakupan kunjungan bayi untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 86,50% dari tahun 2015 sebesar 88,31%. Kabupaten dengan capaian kunjungan bayi terbesar adalah kabupaten Mamuju tengah dengan capaian 95,96% dan terendah kabupaten Mamuju Utara 81,55% Upaya penurunan kematian Bayi dapat diintensifkan dengan peningkatan cakupan kunjungan bayi ke sarana kesehatan. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan ke sarana kesehatan dan kepada petugas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi dibidangnya



## II. PERMASALAHAN

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan.
2. Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mau bertugas/ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
3. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit
4. Belum maksimalnya penanggulangan TB dengan memberdayakan semua potensi yang ada termasuk sharing dana dari APBD yang masih kurang.
5. Masih minimnya anggaran untuk penanggulangan kasus gizi buruk di kabupaten khususnya untuk pelacakan kasus gizi buruk dan penanggulangannya.
6. Masih perlunya peningkatan kapasitas tenaga gizi khususnya di Puskesmas untuk penanggulangan gizi buruk.
7. Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal yang telah dicapai maka diperlukan kerja keras Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dari 8 (Delapan) indikator kinerja kunci bidang kesehatan masih ada beberapa rata – rata capaian indikator kabupaten yang masih rendah.

Pembiayaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2016 berjumlah Rp 12.953.526.200,00 dengan realisasi 85,95 % atau sebesar 9.942.382.102

#### **Saran:**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada pihak terkait untuk peningkatan capaian program di Dinas Kesehatan kabupaten.

## LAMPIRAN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

PROVINSI : Sulawesi Barat

NAMA SKPD : (Dinas Kesehatan)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Kesehatan)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	<sup>1</sup>	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 9 program	75%	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	<sup>2</sup>	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kegiatan APBD</li> <li>2. SOP Kegiatan APBN</li> <li>3. SOP LKPJ</li> <li>4. SOP LPPD</li> <li>5. SOP Monev</li> <li>6. SOP Pembuatan Laporan Evaluasi Renja</li> <li>7. SOP Pembuatan Laporan Realisasi Bulanan</li> <li>8. SOP Pembuatan Surat Pengantar</li> <li>9. SOP Pengantaran Surat dan Laporan</li> <li>10. SOP Surat Keluar</li> <li>11. SOP Surat Masuk</li> <li>12. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti</li> <li>13. Penyesuaian Gaji Berkala Pegawai</li> <li>14. Penyesuaian Gaji Kenaikan Pangkat Pegawai</li> <li>15. Penyesuaian Tunjangan</li> </ol>	Ada SOP Permintaan Obat	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

<sup>1</sup> Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Keluarga Pegawai 16. Pengampraan Perpindahan Gaji Pegawai 17. Pengampraan Gaji CPNS 18. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-TU) 19. Permohonan CPNS menjadi PNS 20. Permohonan Cuti Alasan Penting dan Haji 21. Mutasi Pindah PNS antar UPT 22. Penempatan Dokter-Dokter Gigi PTT 23. Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT 24. Pengusulan Mutasi Pindah PNS 25. Pengusulan Ujian Dinas 26. SOP Pembuatan Izin/Tugas Belajar, PPDS-PPDSG 27. SOP Sty Lencana 28. SOP Usul Pensiun 29. SOP Penanganan Surat Keluar 30. SOP Surat Masuk 31. SOP Pembuatan SK Kegiatan Kadis yang ttd 32. SOP Melaksanakan dan Menyusun Laporan Kegiatan terkait Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Darah dan Pelayanan Kesehatan di DTPK 33. SOP Mencatat dan mengarsipkan surat masuk 34. SOP Mencatat dan mengarsipkan surat Keluar 35. SOP Membuat Konsep surat		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Keluar Seksi Yandas 36. SOP Membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan MONEV 37. SOP Mengikuti pertemuan / rapat sesuai dengan program terkait 38. SOP Melakukan input dan analisa data 39. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan 40. SOP Pelaksanaan Konsultasi 41. SOP Persiapan Pembinaan Program BOK Kabupaten 42. SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi 43. SOP Penanganan Surat Masuk 44. SOP Pembuatan SK dan jadwal kegiatan		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang dilaksanakan SKPD)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan urusan	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak ----.</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM</li> </ul>	1 ( satu ) Perda ASI	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 27</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 27</li> </ul>	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Ada Dokter Umum 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, Perawat umum 2 orang,	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
							Perawat Gigi 1 orang, Apoteker 1 orang, rekam medis 1 orang	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 131 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ..... personil	.....	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
	7		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 org. - Jabatan yang ada, sebanyak -- -27 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2013	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016 , sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Dinas Kesehatan 2. Renja Dinas Kesehatan 3. RKA APBD Dinas Kesehatan 4. DPA APBD Dinas Kesehatan 5. RKA-P Dinas Kesehatan 6. DPPA Dinas Kesehatan 7. RKAKL Dekonsentrasi	7 jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPDP yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14 Program	14,29%	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 Program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						
	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 12.953.526.200,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 9.942.382.102	85,97%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 7.498.745,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 12.953.526.200,00	57,88%	
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 75.500.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 12.953.526.200,00	0,58%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 75.500.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.296.481.200	1,42%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb:  1. Laporan Keuangan Bulanan 2. Laporan Keungan Triwulanan 3. Laporan keuangan semesteran (CALK) 4. Laporan keuangan Tahunan	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Inventarisasi barang atau asset di dinas Kesehatan ada 15 dengan rincian dokumen sbb : 1. Kartu Inventaris barang A- F 2. Buku Inventaris 3. Buku Barang Inventaris 4. Buku barang pakai habis 5. Kartu inventaris ruangan 6. Kartu pemeliharaan 7. Laporan mutasi barang 8. Laporan pengguna barang 9. Nilai perolehan 10. Penerimaan barang 11. Pengadaan barang 12. RKB 13. Rekapitulasi Buku Inventaris 14. Daftar barang rusak	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 377.796.102,67 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp Rp. 15.408.739.157,33	2,45%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman Mas Media. 4. Website 5. Facebook 6. TV 7. Koran 8. Twitter 9. Radio 10. TV 11. SMS Pengaduan	Jumlah sebanyak 7 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik		tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (FISIK DAN KEUANGAN)

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT

KONDISI BULAN : DESEMBER 2016

Unit Kerja : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT  
 Bulan : DESEMBER 2016  
 Sumber Dana : APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.
						FISIK		KEUANGAN						
						%	TTB	RP	(%)	TTB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>BELANJA</b>													
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>8,670,475,464.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>8,648,767,142.00</b>	<b>99.75</b>		<b>21,708,322.00</b>			
	<b>1 Belanja Pegawai</b>													
	Gaji dan Tunjangan	12 Bln	Provinsi	6,572,629,190	75.80	100.00	75.80	6,557,862,359	99.78	75.63	14,766,831			
	Tambahan Penghasilan PNS	12 Bln	Provinsi	2,097,846,274	24.20	100.00	24.20	2,090,904,783	99.67	24.12	6,941,491			
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>284 KEG</b>		<b>12,953,526,200.00</b>	<b>100.00</b>		<b>50.10</b>	<b>9,942,382,102</b>	<b>76.75</b>		<b>3,063,664,086.00</b>			
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>142 KEG</b>		<b>1,170,875,599</b>	<b>9.04</b>		<b>10.03</b>	<b>1,073,742,871</b>	<b>91.70</b>		<b>149,652,716</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 BLN	Provinsi	153,600,000	1.19	100.00	1.19	152,701,733	99.42	1.18	898,267			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 BLN	Provinsi	206,145,599	1.59	100.00	1.59	150,823,698	73.16	1.16	55,321,901			
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	38 Unit	Provinsi	26,500,000	0.20	100.00	0.20	17,434,740	65.79	0.13	9,065,260			
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 BLN	Provinsi	29,040,000	0.22	100.00	0.22	28,900,000	99.52	0.22	140,000			
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 BLN	Provinsi	49,000,000	0.38	100.00	0.38	32,195,000	65.70	0.25	16,805,000			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 BLN	Provinsi	66,140,000	0.51	100.00	0.51	66,126,000	99.98	0.51	14,000			
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 BLN	Provinsi	27,000,000	0.21	100.00	0.21	27,000,000	100.00	0.21	-			
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 PT	Provinsi	41,640,000	0.32	100.00	0.32	38,928,000	93.49	0.30	2,712,000			
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 BLN	Provinsi	6,360,000	0.05	100.00	0.05	4,920,000	77.36	0.04	1,440,000			
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 BLN	Provinsi	240,000,000	1.85	100.00	1.85	239,930,700	99.97	1.85	69,300			
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	6 Kab	Provinsi	265,450,000	2.05	100.00	2.05	264,783,000	99.75	2.04	667,000			
12	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	1 PT	Provinsi	60,000,000	0.46	100.00	0.46	50,000,000	83.33	0.39	10,000,000			
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>32 KEG</b>	<b>Provinsi</b>	<b>343,835,000</b>	<b>2.65</b>	<b>37.50</b>	<b>1.00</b>	<b>291,315,012</b>	<b>84.73</b>	<b>2.25</b>	<b>52,519,988</b>			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 BLN	UPTD Poliklinik	72,035,000	0.56	100.00	0.56	70,260,000	97.54	0.54	1,775,000			
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 BLN	Provinsi	144,800,000	1.12	100.00	1.12	110,621,850	76.40	0.85	34,178,150			
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit	Provinsi	127,000,000	0.98		2.13	110,433,162	86.96	0.85	16,566,838			
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1 KEG</b>	<b>Provinsi</b>	<b>128,700,000</b>	<b>0.99</b>	<b>100.00</b>	<b>0.99</b>	<b>126,850,000</b>	<b>98.56</b>	<b>0.98</b>	<b>1,850,000</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 KL	Provinsi	128,700,000	0.99	100.00	0.99	126,850,000	98.56	0.98	1,850,000			
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19 KEG</b>	<b>Provinsi</b>	<b>208,070,000</b>	<b>1.61</b>	<b>5.26</b>	<b>0.08</b>	<b>179,036,000</b>	<b>86.05</b>	<b>1.38</b>	<b>29,034,000</b>			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 KL	Provinsi	8,050,000	0.06	100.00	0.06	8,050,000	100.00	0.06	-			
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Lap	Provinsi	12,020,000	0.09		17.40	12,004,000	99.87	0.09	605,000			
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	Provinsi	12,520,000	0.10	18000.00	17.40	11,915,000	95.17	0.09	605,000			
4	Penyusunan RKA / DPA SKPD	1 Lap	Provinsi	17,900,000	0.14		0.12	17,185,000	96.01	0.13	5,130,000			
5	Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD	1 Lap	Provinsi	26,230,000	0.20	60.00	0.12	21,100,000	80.44	0.16	5,130,000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Bendahara	12	BLN	Provinsi	89,400,000	0.69		65.71	72,932,000	81.58	0.56	16,468,000			
7	Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	1	Lap	Provinsi	37,950,000	0.29	100.00	0.29	31,850,000	83.93	0.25	6,100,000			
8	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	1	Lap	Provinsi	4,000,000	0.03	100.00	0.03	4,000,000	100.00	0.03	-			
5	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	10	KEG	Provinsi	7,791,515,000	60.15	0.00	0.00	5,482,926,318	70.37	42.33	2,308,588,682			
1	Pemantauan indikator Penggunaan Obat Rasional di PKM Perawatan	3	PT	Provinsi	29,030,000	0.22	33.33	0.07	24,895,000	85.76	0.19	4,135,000			
2	Pemantauan ketersediaan obat dan Vaksin	4	PT	Provinsi	29,630,000	0.23	25.00	0.06	18,875,000	63.70	0.15	10,755,000			
3	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat	2	PT	Provinsi	17,550,000	0.14	600.00	0.81	15,800,000	90.03	0.12	1,750,000			
4	Pelayanan Kefarmasian	1	PT	Provinsi	7,715,305,000	59.56	100.00	59.56	5,423,356,318	70.29	41.87	2,291,948,682			
6	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	12	DESA	Provinsi	44,600,000	0.34	16.67	0.06	40,020,000	89.73	0.31	4,580,000			
1	Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tk. Provinsi	6	KAB	Provinsi	24,910,000	0.19	16.67	0.03	22,210,000	89.16	0.17	2,700,000			
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan program Kesetradkom	6	KAB	Provinsi	19,690,000	0.15	200.00	0.30	17,810,000	90.45	0.14	1,880,000			
7	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	1	KEG	6 Kab	96,960,001	0.75	600.00	4.49	96,960,001	100.00	0.75	-			
1	Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan	1	Lap		96,960,001	0.75		154.34	96,960,001	100.00		-			
8	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	6	KEG	6 Kab	599,525,000	4.63	33.33	1.54	474,689,000	79.18	3.66	124,836,000			
1	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan Masalah Gizi di U	1	Lap	Provinsi	126,104,000	0.97	2500.00	24.34	124,255,000	98.53	0.96	1,849,000			
2	Pelatihan Motivator ASI *	2	Lap	UPTD IFP	149,630,000	1.16	600.00	6.93	140,860,000	94.14	1.09	8,770,000			
3	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pembentukan Kelompok Pe	3	Lap	Provinsi	323,791,000	2.50	16.67	0.42	209,574,000	64.73	1.62	114,217,000			
9	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	7	KEG	UPTD IFP	317,817,300	2.45	5.71	0.14	299,552,300	94.25	2.31	18,265,000			
1	Pemicuan Jamban Sehat	6	KAB	6 Kab	257,460,000	1.99	50.00	0.99	239,195,000	92.91	1.85	18,265,000			
2	Pertemuan jejaring STBM	1	Lap	6 Kab	60,357,300	0.47	100.00	0.47	60,357,300	100.00	0.47	-			
10	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	7	KEG	UPTD IFP	130,250,000	1.01	10.00	0.10	111,990,000	85.98	0.86	18,260,000			
1	Pelacakan Kasus Malaria	6	KAB	Provinsi	68,750,000	0.53	1800.00	9.55	63,240,000	91.99	0.49	5,510,000			
2	Cold Room	1	PT	Provinsi	61,500,000	0.47	2200.00	10.45	48,750,000	79.27	0.38	12,750,000			
11	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	16	KEG	Provinsi	1,265,539,400	9.77	218.75	21.37	1,232,243,700	97.37	9.51	33,295,700			
1	Perencanaan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	1	LAP	Provinsi	115,437,000	0.89	0.00	0.00	105,927,000	91.76	0.82	9,510,000			
2	Monitoring dan Evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	KAB	Provinsi	97,230,000	0.75	1960.00	14.71	95,000,000	97.71	0.73	2,230,000			
3	Peningkatan program PONEK di RS	1	LAP	Provinsi	237,141,900	1.83	3300.00	60.41	235,196,900	99.18	1.82	1,945,000			
4	Pelatihan perawat pelaksana puskesmas *	1	LAP	6 Kab	189,125,500	1.46	200.00	2.92	189,122,500	100.00	1.46	3,000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU (Rp)	BOBOT KEGIATAN	REALIASI					SISA PAGU ANGGARAN	PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH	KET.	
						FISIK		KEUANGAN							
						%	TTB	RP	(%)	TTB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar	6	LAP		47,665,000	0.37		134.37	47,217,000	99.06	0.36	448,000			
6	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan di DTPK dan Lokasi Bar	1	LAP	Provinsi	38,940,000	0.30	2300.00	6.91	37,940,000	97.43	0.29	1,000,000			
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik	1	LAP	6 Kab	540,000,000	4.17	500.00	20.84	521,840,300	96.64	4.03	18,159,700			
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>3</b>	<b>KEG</b>	<b>6 Kab</b>	<b>504,730,000</b>	<b>3.90</b>	<b>200.00</b>	<b>7.79</b>	<b>301,290,000</b>	<b>59.69</b>	<b>2.33</b>	<b>203,440,000</b>			
1	Peningkatan pelayanan Kespro yg responsif gender	1	LAP	Provinsi	200,000,000	1.54	4000.00	61.76	-	0.00	0.00	200,000,000			
2	Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun untuk PKM	1	LAP	BKTM Makassar	200,000,000	1.54	2400.00	37.06	197,040,000	98.52	1.52	2,960,000			
3	Pelatihan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	1	LAP		104,730,000	0.81		24.44	104,250,000	99.54	0.80	480,000			
<b>13</b>	<b>Program Kebijakan dan Management Pembangunan kesehatan</b>	<b>19</b>	<b>KEG</b>	<b>6 Kab</b>	<b>229,173,900</b>	<b>1.77</b>	<b>78.95</b>	<b>1.40</b>	<b>161,281,900</b>	<b>70.38</b>	<b>1.25</b>	<b>67,892,000</b>			
1	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi	1	LAP	Provinsi	22,614,900	0.17	13200.00	23.05	22,614,900	100.00	0.17	-			
2	Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara	6	KAB		44,020,000	0.34		1.72	29,637,000	67.33	0.23	14,383,000			
3	Kalakarya Kesehatan	12	DESA	Provinsi	162,539,000	1.25	50.00	0.63	109,030,000	67.08	0.84	53,509,000			
<b>14</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>3</b>	<b>KEG</b>	<b>Provinsi</b>	<b>60,705,000</b>	<b>0.47</b>	<b>200.00</b>	<b>0.94</b>	<b>48,705,000</b>	<b>80.23</b>	<b>0.38</b>	<b>12,000,000</b>			
1	Penilaian Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas	3	Regional	Provinsi	60,705,000	0.47	33.33	0.16	48,705,000	80.23	0.38	12,000,000			
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>6</b>	<b>KEG</b>		<b>61,230,000</b>	<b>0.47</b>		<b>0.16</b>	<b>21,780,000</b>	<b>35.57</b>		<b>39,450,000</b>			
1	Pengembangan SIK	6	KAB	Provinsi	61,230,000	0.47	33.33	0.16	21,780,000	35.57	0.17	39,450,000			
<b>JUMLAH (PROG ...&amp; KEG .....</b>				<b>Rp</b>	<b>21,624,001,664</b>	<b>100.00</b>		<b>75.05</b>	<b>Rp</b>	<b>18,591,149,244</b>	<b>85.97</b>	<b>Rp</b>	<b>3,085,372,408</b>		

Mamuju, 31 Desember 2017  
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar

  
Dr. H. ACHMAD AZIS, M.Kes  
NIP. 195905151989031016